



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 841/XI/2014

III/NOVEMBER 2014



Ketua DPR Buka Sidang Parlemen Asia Pasifik

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PARLIAMENTARY EVENT ON
DEVELOPMENT GOALS (MDGs) ACCELERATION
AND POST - 2015 AGENDA
13 NOVEMBER 2014, SURABAYA - INDONESIA



Ketua DPR Buka Sidang Parlemen Asia Pasifik

Ketua DPR Setya Novanto membuka sidang Parlemen Asia Pasifik terkait percepatan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) dan persiapan menuju *Post 2015 Development Agenda* di Surabaya, Rabu (12/11).

Pada kesempatan itu, Setya Novanto mengingatkan kembali bahwa waktu pencapaian MDGs hanya tersisa 415 hari, dan setelah itu, Parlemen harus bersiap menyambut agenda pembangunan pasca 2015. “Sampai saat ini negara-negara Asia Pasifik masih menghadapi berbagai agenda pembangunan yang belum usai,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan kedepan yaitu permasalahan urbanisasi, dampak perubahan iklim dan *global warming*, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya harus menjadi perhatian serius.

Kondisi pencapaian MDGs yang banyak belum tercapai di negara-negara Asia Pasifik, pada umumnya terkait tingginya tingkat kemiskinan, Angka Kematian anak dan angka kematian ibu (AKI) yang sangat mengkhawatirkan, dan terbatasnya akses sanitasi dan air bersih.

Di Indonesia AKI mengalami pening-



Ketua DPR RI Setya Novanto saat membuka Sidang Parlemen Asia Pasifik

katan yang sangat signifikan dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup (2007), menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2012. Selain itu sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap air bersih.

Acara kali ini mengusung tema “Penguatan Peran Parlemen Asia Pasifik dalam MDGs dan *Post 2015 Development Agenda (Strengthening the role of Asia Pacific Parliaments on MDGs Acceleration and Post-2015 Development*

Agenda). Upaya percepatan MDGs di akhir waktu sebelum 2015 dituangkan dalam sesi hari ini “*Attaining the MDGs by 2015 : Are we there yet?*” dan sesi pada hari Kamis (13/11) membahas *stepping stone* perumusan target pembangunan pasca 2015 : “*Moving forward : Parliamentary Engagement in Devising Development Agenda Beyond 2015*.” Dalam sesi I dan II hari ini, beberapa delegasi akan menyampaikan *lesson learned* dari negaranya masing-masing. (si) foto : [denus/parle/iw](#).

Parlemen Asia Pasifik Kawal Proses Agenda Pembangunan Pasca 2015

Seluruh Peserta Sidang Parlemen Se-Asia Pasifik sepakat untuk menjadi bagian dari delegasi Nasional dalam proses perundingan antar pemerintah

untuk agenda pasca 2015 mendatang.

“Deklarasi Surabaya dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian *Mille-*

nium Delopment Goals (MDGs) pada tahun 2015 nanti, sekaligus merangkum aspirasi-aspirasi yang tertinggal dari agenda pembangunan milenium,” ujar

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat konferensi Pers, di Surabaya, Kamis, (13/11).

Nurhayati mengatakan, delegasi peserta sidang menekankan adanya keterkaitan secara nasional dalam agenda pembangunan global. “Seringkali pemerintah tidak melaporkan apapun kepada kita terkait pencapaian MDGs, ini juga menjadi salah satu keprihatinan anggota parlemen lainnya, sehingga pada akhirnya dukungan politik terhadap pencapaian MDGs tidak begitu kuat,” katanya.

Deklarasi Surabaya, lanjut Nurhayati, juga berisi mengenai agenda pembangunan kedepan yang menitik beratkan pada hidup layak. Untuk itu, pemenuhan aspek-aspek mendasar menjadi krusial namun perluasan dari kebutuhan mendasar menjadi bagian yang tak terelakkan dari rencana kedepan.

Parliamentary Event on MDGs acceleration and Post 2015 Development Agenda diselenggarakan selama dua hari



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat konferensi pers MDGs

sejak 11-13 November 2014 atas inisiatif BKSAP. Acara tersebut digelar untuk merekam masukan delegasi negara Asia-Pasifik dalam pencapaian MDGs dan tantangannya kedepan. Pertemuan ini sekaligus menjaring aspirasi untuk agenda pembangunan kedepan

diikuti oleh 20 Parlemen negara Asia dan Pasifik dengan dua tema spesifik, yakni *attaining the MDGs : Are we there yet?* dan *Moving Forward : Parliamentary engagement in devising the post-2015 Development Agenda*. (si) foto : eka hindra/parle/iw

Deklarasi Surabaya Munculkan Isu Terorisme dan Ekstremis

Pada Pertemuan Parlemen se-Asia Pasifik yang dihadiri 96 delegasi dari 20 negara Parlemen mencuat butir isu terorisme dan ekstremis yang sempat menjadi isu hangat di berbagai negara kawasan Asia Pasifik.

“Deklarasi juga menyoroti hal-hal yang selama ini lepas dari agenda MDGs seperti konflik, perang dan juga penguatan tata kelola (*democratic governance*),” ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat konferensi pers, di Surabaya, Kamis, (13/11).

Menurutnya, dampak dari konflik memberikan kerugian yang besar dalam pembangunan. “Sementara demokrasi yang tercermin dari semakin efektifnya tata kelola pemerintahan termasuk transparansi dan akuntabilitas, dapat meningkatkan pelayanan publik secara mendasar,” tandasnya.

Selain itu, isu yang sempat mencuat



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

lainnya, mengenai isu perubahan iklim dan bencana alam. Pasalnya beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Filipina, Vanuatu dan Tonga merupakan negara yang paling rawan akan bencana alam. Tak hanya badai tapi juga banjir, gempa bumi serta letusan gunung berapi mengancam negara Filipina.

Butir terkait terorisme dan ekstremisme tidak secara eksplisit termuat didalam 24 butir deklarasi Surabaya. tetapi tersirat didalam butir 14, 16, dan 17 yang menyinggung mengenai keamanan, perdamaian dunia, dan Hak Asasi Manusia.

Parliamentary Event on MDGs acceleration and Post 2015 Development Agenda diselenggarakan selama dua hari sejak 11-13 November 2014 atas inisiatif BKSAP. Acara tersebut digelar untuk merekam masukan delegasi negara Asia-Pasifik dalam pencapaian MDGs dan tantangannya kedepan. Pertemuan ini sekaligus menjaring aspirasi untuk agenda pembangunan kedepan diikuti oleh 20 Parlemen negara Asia dan Pasifik dengan dua tema spesifik, yakni *attaining the MDGs : Are we there yet?* dan *Moving Forward : Parliamentary engagement in devising the post-2015 Development Agenda*. (si) foto : eka hindra/parle/iw

Ketua Baleg Terima Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg) Sarehwiyono Rabu (12/11/2014) menerima 150 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan.

Sareh menyatakan sangat senang atas kedatangan para mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, menurutnya mahasiswa perlu mengetahui apa yang dilakukan wakilnya di DPR.

“Tidak hanya mendengar dari cerita atau hanya lihat di televisi, seolah-olah DPR selalu perang didalamnya dimana ada Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebetulnya itu hanyalah biasa dan tidak ada apa-apa,” kata Sareh saat menerima rombongan mahasiswa UIN Wali Songo yang dipimpin Nurkhoirin, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR, Jakarta.

Sareh menambahkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat DPR akan bekerja dengan baik, bersama-sama. Disini, tegasnya, bukan untuk mencari sesuatu tetapi mengemban tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sareh sedikit menjelaskan perjalanan karirnya sampai di DPR. Dimana setelah dirinya mengemban tugas di dunia peradilan, ia terjun ke dunia politik dalam rangka mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sesuai dengan bidangnya yaitu bidang hukum.

Ia menyampaikan, bahwa dirinya selain sebagai Ketua Baleg, juga sebagai anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Sareh



Ketua Baleg DPR saat menerima mahasiswa UIN

menjelaskan bahwa dirinya menyadari bahwa selama ini DPR banyak mendapat kritik dari masyarakat karena rendahnya produk UU yang dihasilkan.

“Hasil pelaksanaan prolegnas jangka menengah keanggotaan DPR 2010-2014 jika dilihat dari segi banyaknya UU yang pro-rakyat, dapat dikatakan cukup berhasil namun dipandang dari segi kuantitatif jumlah produk UU yang dihasilkan masih dipandang minim,” papar politisi Partai Gerindra.

Saat menerima mahasiswa tersebut, Sareh didampingi anggota DPR dari Fraksi PKB yang juga almamater UIN Wali Songo yaitu Chusnunia dan Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI Johnson Rajagukguk.

Kepada mahasiswa yang hadir, Johnson menjelaskan fungsi dan tugas Baleg DPR serta proses perjal-

nan pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disahkan menjadi Undang-Undang di DPR.

Sementara Chusnunia, memotivasi mahasiswa UIN Wali Songo yang hadir bahwa dirinya sama dengan mahasiswa yang lain namun bisa juga menjadi wakil rakyat.

Diceritakan Nunik, begitu sapaan akrabnya, dirinya pada tahun 2000 juga sama melakukan KKL di DPR dan diterima Baleg DPR seperti saat ini. Namun, ia mengakui dirinya termasuk mahasiswa yang tidak bertanya pada saat itu.

Nunik berpesan pada adik almamaternya tersebut, untuk meraih suatu cita-cita, kita harus kerja keras dan tetap fokus. (sc) foto: naefurodjie/parle/iw

Ketua DPR Maafkan Dua Mahasiswa Pemereras

Ketua DPR RI Setya Novanto memaafkan dua mahasiswa pemereras dirinya yang ditahan di Polres Jakarta Selatan. Dua mahasiswa tersebut merupakan kader HMI yang melaku-

kan teror dengan berdemonstrasi di depan kediamannya.

Tiba Selasa sore (11/11) dengan mengenakan kemeja biru

di Polres Jakarta Selatan, Setya Novanto menemui dua terlapor bersama Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol. Wahyu Hadiningrat. Saat dipertemukan, dua mahasiswa tersebut yang didampingi orangtuanya langsung menyatakan menyesal dan meminta maaf. Bahkan keduanya juga mencium tangan Setya Novanto.

Kasus ini bermula dari laporan Ketua DPR tersebut ke Polres Jakarta Selatan atas tindakan pemerasan yang dilakukan dua mahasiswa kepada Setya Novanto lewat SMS. Keduanya meminta sejumlah dana. Bila tidak diberikan, keduanya mengancam akan terus meneror dengan berdemo di depan rumah politisi Partai Golkar itu. Dua mahasiswa tersebut bernama Mukhaladun dan Muhammad Edwin.

Kapolres Wahyu Hadiningrat dalam keterangannya usai pertemuan, mengungkapkan, dua mahasiswa ini dijerat pasal pemerasan KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Keduanya tertangkap tangan sedang menerima uang hasil pemerasannya di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu keduanya langsung ditahan. Kasus ini masih terus diproses.

Sebelumnya, Setya Novanto sendiri sudah melayangkan surat laporan tiga minggu yang lalu ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik. Hadir dalam pertemuan itu Ketua PB HMI Arif Rosyid yang mengklarifikasi tindakan dua kadernya. Menurut Arif, dua mahasiswa ini bergerak tidak atas nama HMI.

Setya Novanto sendiri secara tulus menyambut baik pen-



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menemui dua mahasiswa pemeras

gakuan bersalah kedua mahasiswa ini dan telah memaafkan keduanya. Dengan menandatangani surat jaminan atas nama dirinya, kedua mahasiswa ini akan diberi penangguhan penahanan. Surat jaminan juga datang dari kedua orangtua mahasiswa dan Ketua PB HMI.

“Saya sebagai orang yang punya belas asih tentu saya memaafkan. Apalagi mereka berdua datang dengan orangtuanya masing-masing dan Ketua HMI. Tentu saya sebagai orangtua memberi maaf betul-betul. Kasihan juga. Dia masih punya masa depan. Ini sebagai pembelajaran saja supaya tidak terjadi kembali,” aku Setya Novanto.

“Kalau orang pernah berbuat salah lalu minta maaf, saya yakin dia akan menjadi orang yang lebih baik,” kata Setya lagi. (mh) foto: naefuroji/parle/iw

Perpustakaan Jangan Digabung Dengan Arsip



Jajaran Pimpinan Komisi X DPR

Penggabungan perpustakaan dengan arsip di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dapat menjadi masalah tersendiri. Seharusnya, dua lembaga ini tidak digabung menjadi satu lembaga, atau satu gedung. Mengingat, dua lembaga ini memiliki bidang kerja dan fungsi yang berbeda.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X dengan para pakar perpustakaan, yaitu Bambang Supriyo Utomo, Agus Rusmana, dan Sudirwan Hamid. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (12/11).

Ditemui usai rapat, Wakil Ketua Komisi X Nuroji, yang sekaligus memimpin rapat, menyatakan masih banyak ditemukannya perpustakaan dan arsip yang berada dalam satu kelembagaan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi dari kepala daerah yang menilai perpustakaan dan arsip merupakan bidang yang sama.

“Menurut para narasumber, bidang perpustakaan dan arsip itu bidang yang berbeda. Namun dalam prakteknya, secara kelembagaan, perpustakaan selalu disatukan dengan arsip. Padahal, arsip itu kan sifatnya pasif, artinya tidak dibaca lagi. Sementara, kalau perpustakaan itu aktif, selalu dibaca lagi. Itu fungsi yang berbeda. Ini karena persepsi yang berbeda dari kepala daerah itu,” jelas Nuroji.

Politisi Gerindra ini menambahkan, persepsi di kepala daerah ini harus dibenahi dulu, sehingga ada kemauan memisahkan perpustakaan dan arsip. Ironisnya lagi, dikawatirkan pemerintah daerah kurang memahami fungsi perpustakaan, maupun fungsi arsip.

“Saya tidak tahu, kapan pemahaman seperti itu dimulai. Baiknya persepsi itu mesti diubah, bahwa perpustakaan dan arsip itu berbeda. Mungkin dari kacamata kepala daerah, itu untuk efisiensi, sehingga dijadikan satu gedung. Pa-

dahal sangat jelas, fungsinya sangat berbeda,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat VI ini.

Ketika ditanya apakah perlu dipertegas dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, Nuroji menguatkan hal itu. Ia menilai, PP mengenai kelembagaan masih sangat lemah, sehingga masih banyak ditemukan penggabungan kedua bidang itu.

Hal yang sama diutarakan oleh Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Bambang Supriyo Utomo, selaku narasumber pakar. Ia menilai, penggabungan kedua lembaga ini tidak tepat. Namun ia tidak memungkiri, hal ini diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran.

“Hampir di semua pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, perpustakaan masih digabung dengan arsip. Mungkin karena adanya UU Otonomi Daerah, karena keterbatasan pegawai maupun anggaran. Penggabungannya tidak tepat,” jelas Bambang.

Padahal, sudah ada landasan hukumnya, yaitu UU nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang kemudian diperkuat dengan PP 38 Tahun 2007. “Landasan hukumnya sudah cukup kuat. Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikan UU itu sendiri,” tambah Bambang.

Nuroji menyatakan, hasil RDPU ini akan dibawa ke RDP dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sehingga, seluruh Anggota Komisi X dapat memberi masukan terkait program-program kepada PNRI. (sf) foto: [odjie/parle/iw](#)

Komisi III Terima Aduan KAI



Suasana rapat Komisi III DPR dengan KAI

Komisi III DPR RI, Selasa (11/11) yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin menerima pengaduan para advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI). Mereka mengadukan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap konstitusi. Hal itu menyebabkan terampasnya hak-hak hukum dan hak konstitusional puluhan ribu advokat KAI.

“Mahkamah Agung tidak mau menjalankan Pasal 4 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. MA tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PUU-VII/2009, selain itu MA dengan sengaja mengeluarkan surat-surat yang nyata-nyata hal itu sebagai bentuk intervensi dan penghambatan MA terhadap hak-hak advokat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. MA juga telah berlaku diskriminatif terhadap hak-hak hukum advokat,” jelas Tjoetjoe S Hernanto, Presiden KAI.

Dengan pelanggaran tersebut, menurut Tjoetjoe, puluhan ribu advokat tidak dapat menjalankan pekerjaannya, tidak dapat dan atau terhambat di dalam mencari nafkah, ternistakan dalam pergaulan sosial. Sementara mencari nafkah di negeri ini merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Mendengar aduan dan keluhan tersebut, Ketua Komisi III Aziz Syamsudin berjanji terlebih dahulu akan mempelajari hal tersebut. Bahkan sebagai tindak lanjut, jika diperlukan pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak terkait, Mahkamah Agung misalnya, untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Karena tidak ada satu pihak pun yang berhak merampas hak-hak asasi seseorang yang jelas-jelas telah dilindungi negara dalam undang-undang. (Ayu) foto: [andri/parle/iw](#).

Perlunya Lembaga Sertifikasi Amil dan Zakat

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan adanya lembaga sertifikasi Amil dan Zakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Forum Zakat dan MUI, Selasa (11/11) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

“Saya mengusulkan adanya lembaga sertifikasi Amil dan Zakat, karena kalau sudah bisa mengumpulkan seba-

nyak 1 Miliar dalam setiap tahunnya itu harus disertifikasi karena harus berguna bagi umat banyak. Jangan sampai uang yang dikumpulkan dari umat itu malah tidak sesuai peruntukannya,” kata Saleh.

Saleh melanjutkan, saat ini tercatat sekitar 400 lembaga zakat yang telah berdiri dan mengelola zakat umat. Jumlah itu semakin meningkat di saat menjelang Idul Fitri. Meski yang ditampung tidak hanya zakat fitrah saja, terkadang



Jajaran Pimpinan Komisi VIII DPR

juga zakat maal.

Bahkan berdasarkan laporan yang disampaikan MUI, menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Mustafa Edwin Nasution, potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp20 triliun per tahunnya.

Melihat kondisi demikian Saleh berpendapat sudah seyakinya Indonesia memiliki lembaga sertifikasi Amil dan Zakat, sebagaimana profesi lainnya yang sudah memiliki lembaga sertifikasi seperti guru, dokter, dan sebagainya. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

DPR Bersatu Melawan Wartawan

Anggota DPR dan Wartawan Koordinator DPR berlarian, bahkan sampai tersungkur saling berkejaran. Bahkan nafas pun sampai terengah-engah. Peluh keringat pun bercucuran. Namun ini bukan tawuran atau tindakan kekerasan yang terjadi antar kedua pihak.

Ya, inilah suasana pertandingan sepakbola antara Anggota DPR melawan seluruh wartawan yang terdaftar di Wartawan Koordinator DPR. Pertandingan yang berlangsung di lapangan sepakbola DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (11/11) sore, ini berlangsung cukup sengit, namun tetap meriah dan kekeluargaan.

Pertandingan berakhir dengan skor 2-1, dengan kemenangan di pihak Anggota DPR. Gol pertama dicetak oleh Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron. Tak lama berselang, gol kedua diciptakan oleh Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Keduanya mencetak gol di babak pertama. Namun sayangnya di babak kedua, kubu wartawan berhasil membalas satu angka, yang dicetak oleh pemain bernomor punggung 7.

Selain Herman dan Edhy, Anggota DPR lain yang ikut terlibat diantaranya Saan Mustopa, Rinto Subekti, Al Muzamil Yusuf, Fary Djemi Francis, Mukhamad Misbakhun, Azis Syamsuddin, Refrizal, Syarifuddin Sudding, Gus Irawan Pasaribu, Andi Akmal Pasludin, dan Anthon Sihombing.

Ditemui usai pertandingan, Edhy mengakui, akhir-akhir ini terjadi perbedaan pendapat antar kedua kubu, sehingga dengan adanya pertandingan ini, dapat menurunkan tensi panas di DPR.

“Kita mencoba dengan kegiatan ini untuk menurunkan tensi, jadi tidak ada persiapan khusus. Begitu kita tawarkan ke wartawan, gimana kalau kita bikin Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sama-sama melawan wartawan. Ada perbedaan pendapat, ini perlu kita satukan,” kata Edhy.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan ini menegaskan, walaupun ini tidak mengikat, namun perbedaan dapat menjadi satu, dan tercipta diplomasi olahraga.

“Sebenarnya di sini kita enjoy-enjoy saja. Di sinilah perbedaan menjadi satu. Ini salah satu komunikasi yang kita ba-



Tim Sepak Bola KMP dan KIH melawan Koordinator Wartawan DPR

ngun, bagaimana agar suasana mencair, di sektor olahraga. Insya Allah setelah ini tidak ada ketegangan lagi antara dua kubu di DPR,” harap Edhy.

Sementara itu, Ketua Wartawan Koordinator DPR Hilman Matauch menyatakan, pertandingan sepakbola ini sudah jauh hari direncanakan. Namun baru sekarang ketemu waktu yang tepat antara Anggota DPR dan wartawan.

“Jauh hari sudah kita bicarakan dengan kedua belah pihak. Ini upaya dari wartawan, untuk membuat suasana mencair di DPR, yang kita tahu beberapa minggu terakhir ini sangat panas, yaitu antara kubu KMP dan KIH,” jelas cameramen Metro TV ini.

Ia menambahkan, makna dari pertandingan ini adalah untuk memperkuat, serta menghilangkan faksi-faksi yang ada di DPR. Selain itu, untuk membangun sportifitas dan memupuk silaturahmi, agar semua dapat bersatu.

“Sekarang sudah tidak ada lagi faksi KMP ataupun KIH. Yang ada adalah faksi Anggota DPR RI. Wartawan, berharap itu akan terus terjadi. Sehingga, kinerja DPR dan wartawan akan semakin lancar, tidak ada keributan lagi,” jelas Hilman.

Selain pertandingan sepakbola, ke depannya direncanakan akan dilaksanakan pertandingan-per pertandingan lain, seperti tenis dan lomba memancing. (sf)/foto:andri/parle/iw.



Warna-warni

Ketua DPR RI Setya Novanto menemui dua tersangka Mahasiswa pemerass di Polres Jakarta Selatan



DPR Promosikan Keragaman Indonesia

DPR RI selalu menggunakan kesempatan pertemuan parlemen internasional untuk mempromosikan kekayaan keragaman budaya Indonesia. Dalam *Parliamentary Event on MDGs Acceleration and the Post-2015 Development Agenda* 12-13 November di Surabaya, Jatim peluang itu datang lagi.

“Kita selalu undang delegasi mengeksplorasi keragaman Indonesia, dimulai dengan *dinner* selamat datang ini. Kita perkenalkan kuliner Indonesia, gado-gado, sop iga, tarian madura, nyanyian daerah yang bahasanya beragam. Selanjutnya delegasi silahkan berkunjung ke daerah,” kata Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf usai acara *Welcome Dinner* di Surabaya, Jatim, Selasa (12/11).

Dalam pertemuan yang dihadiri 20 delegasi negara dari kawasan Asia Pasifik ini ditampilkan Tarian Bedoyo Majakirana dan Tari Geleng Room. Para tamu memberikan apresiasi kepada seluruh sajian terutama Tari Geleng



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

Room yang menggambarkan budaya Madura yang dinamis, unik dan kegairahan perempuan Madura sebagai penopang kehidupan.

Anggota delegasi dari Banglades

Hosne Ara Begum yang datang pada acara *Jamuan Selamat Datang* dengan pakaian khas negaranya memberikan komentar singkat terhadap acara malam itu. “Excellent,” ujar dia sambil tersenyum dan mengacungkan jempol kanannya.

Sementara Datin Hajah Zaharah Haji Jafar anggota parlemen dari Brunei Darussalam mengatakan walaupun memiliki kemiripan tapi dari segi rasa kuliner Indonesia berbeda dengan negaranya. “Tidak samalah dengan Brunei, makanan Indonesia enak-enak,” ungkap Zaharah yang datang bersama tujuh anggota delegasi.

Pada acara pembuka ini para anggota delegasi saling memperkenalkan diri, tukar menukar kartu nama. Esok hari mereka memasuki suasana persidangan dengan tema utama; “*Strengthening the Role of Asia-Pasific Parliaments on MDGs Acceleration and the Post-2015 Development Agenda.*”

(iky), foto : eka hindra/parle/iw

20 Negara Hadiri Parliamnet event on MDGs



Delegasi Parlemen Asia Pasifik foto bersama

20 negara delegasi Parlemen Asia Pasifik menghadiri *Parliamentary event on Millenium Development Goals (MDGs)*

Acceleration and Post-2015 Agenda.

Negara yang hadir yakni Afghanis-

tan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Republik of Korea, (Korsel), Malaysia, Maldives, Mongolia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Tonga, Vanuatu, dan Vietnam. Acara berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 12-13 November 2014

Sejumlah pembicara dipastikan menghadiri event tersebut, seperti Indonesia Country Director UNDP Ms. Beate Traenkmann, Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Edimon Ginting, Executive Director INFID Sugeng Bahagijo, Asia Regional Coordinator Beyond 2015 Soeung Saroeng, Utusan Khusus Presiden untuk Agenda Pembangunan pasca 2015 tahun 2009-2014 Hasan Kleib, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Ling-

kungan Hidup Bappenas Endah Murniningtyas.

Pada kesempatan itu Ketua BKSAP

Nurhayati Ali Assegaf juga akan menjadi pembicara untuk berbagi pengalaman terkait MDGs dan agenda pembangunan pasca 2015 yang telah

dilakukan oleh Parlemen. (si), foto : eka hindra/parle/iw

DPR Usulkan Empat Prinsip Agenda Pasca 2015

Batas akhir pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 sudah semakin dekat. Sejumlah persoalan yang belum tuntas diproyeksikan menjadi Post-2015 Development Agenda. DPR mengusulkan empat prinsip penting sebagai landasannya.

“Kami mengusulkan Agenda Pembangunan Pasca-2015 berdasarkan empat prinsip yaitu kesetaraan, hak asasi manusia, kesinambungan dan kesetaraan gender,” kata juru bicara delegasi Indonesia Dave Laksono dalam paparannya pada Sidang Parlemen tentang Akselerasi MDGs dan Agenda Pasca-2015 di Surabaya, Jatim, Rabu (12/11/14).

Secara khusus politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan DPR mengusulkan slogan kebersamaan pada Agenda



Delegasi Indonesia Dave Laksono

Pasca-2015 yaitu *Leave No One Behind* (Tidak Seorangpun Tertinggal di Belakang).

Dalam paparannya ia menyebut ada 3 target MDGs yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah

Indonesia yaitu kematian bayi dan ibu melahirkan, penyebaran HIV/AIDS dan ketersediaan air bersih.

“DPR akan terus bekerja sama dengan pemerintah menuntaskan permasalahan ini lewat fungsi legislasi, pengawasan dan anggarannya,” ujar politisi muda putra mantan Ketua DPR Agung Laksono ini.

Agenda utama pada hari pertama Pertemuan Parlemen se-Asia Pasifik di Surabaya, Jatim 12-13 November adalah mendengarkan kemajuan dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Diharapkan dalam sesi ini setiap negara dapat saling memberi masukan untuk mengakselerasikan capaian MDGs menjelang batas akhir tahun 2015. (iky), foto : sugeng irianto/parle/hr.

Parlemen Asia Pasifik Soroti Tingginya Kematian Ibu dan Anak

Salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) adalah penurunan angka kematian ibu dan anak. Parlemen Asia Pasifik yang sedang mengikuti Pertemuan Akselerasi Target MDGs dan Agenda Pasca 2015 di Surabaya, Jatim saling berbagi pengalaman untuk mengatasi persoalan ini.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf memperkenalkan program Jampersal (Jaminan Persalinan), layanan persalinan gratis yang disiapkan pemerintah. Kegiatan ini cukup efektif menekan angka kematian ibu melahirkan.

“Angka kematian ibu melahirkan sekarang sudah menurun secara sig-



Anggota parlemen dari Pakistan Maiza Hameed

nifikan dengan adanya program yang diberikan Pak SBY yakni Jampersal atau Jaminan Persalinan, artinya seluruh masyarakat bisa bersalin di rumah sakit dengan gratis,” tuturnya.

DPR lewat Panja MDGs yang dibentuk BKSAP menurutnya berperan mengawal, mendorong, mendukung pemerintah khususnya dalam mencapai target MGDs 2015. Ia mengakui ada target yang belum berhasil dicapai namun secara umum sudah banyak perbaikan yang berhasil diraih.

Sementara itu anggota parlemen dari Pakistan Maiza Hameed mengakui lambatnya capaian target MDGs terkait isu perempuan. Baginya solusi melibatkan perempuan sebagai pihak

yang turut membuat kebijakan menjadi penting.

“Kebijakan 30 persen anggota parlemen adalah perempuan kita lakukan, tujuannya agar perempuan dapat terlibat dalam upaya mencapai tujuan MDGs ini,” kata dia.

Beate Trankmann, Country Director UNDP (*United Nations Development Programme*) di Indonesia yang hadir sebagai pembicara menegaskan langkah menekan angka kematian ibu dan anak tidak hanya terkait layanan kesehatan.

“Menekan angka kematian ibu anak

ini masalah kompleks, bukan hanya masalah layanan kesehatan tapi juga terkait investasi di bidang transportasi, upaya deteksi dini dan lain-lain,” ungkapnya. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.

Sambutan Parlemen Asia Pasifik Dinilai Positif

Delegasi parlemen dari 20 negara di kawasan Asia-Pasifik menghadiri Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post-2015 Agenda. Sambutan negara sahabat untuk mengikuti kegiatan di Surabaya 12-13 November ini, dinilai cukup memuaskan.

“Saya rasa kehadiran 20 negara ini cukup baik ya, positif, apalagi ini sempat ditunda karena ada agenda pelantikan anggota DPR. Kehadiran sebesar ini cukup untuk memetakan permasalahan dan melakukan akselerasi target MDGs,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai acara pembukaan di Surabaya, Jatim, Rabu (12/11/14).

DPR menurutnya bisa belajar dari parlemen negara lain untuk mencari solusi sejumlah permasalahan yang menghambat capaian Milenium Development Goals yang telah ditetapkan PBB sejak tahun 2000 lalu.

“Target MDGs cukup tinggi ya jadi tidak semua bisa tercapai, kita saling belajar dalam pertemuan ini. DPR tentu siap berbagi pengalaman terutama bagaimana mendorong pemerintah dari aspek pengawasan dan legislasi,” tekannya.

Ketika disinggung wartawan tentang ketidakhadiran anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat, ia menyebut karena mereka belum mendaftarkan anggotanya di BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen).



Pimpinan DPR RI didampingi Ketua BKSAP saat menggelar Konferensi Pers

“Bukan kita tidak mengajak, masalahnya inikan agenda kegiatan BKSAP sementara mereka belum menyerahkan nama, bagaimana bisa ikut. Kita terus bekerja saja, awal Desember nanti saya juga memimpin delegasi ke sidang parlemen Asia di Pakistan,” tuturnya.

Pada bagian lain politisi Fraksi Partai Gerindra ini memaparkan sejumlah langkah untuk menyatukan kembali dua koalisi di DPR. Ia meyakini setelah pertemuan dengan Pramono Anung yang mewakili KIH upaya membangun kebersamaan itu akan segera terwujud. (iky), foto : eka hindra/parle/iw

Indonesia-Vanuatu Galang Kerjasama Parlemen

Parlemen Indonesia dan Vanuatu menyepakati dan menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) mengenai program kemitraan antar Parlemen.

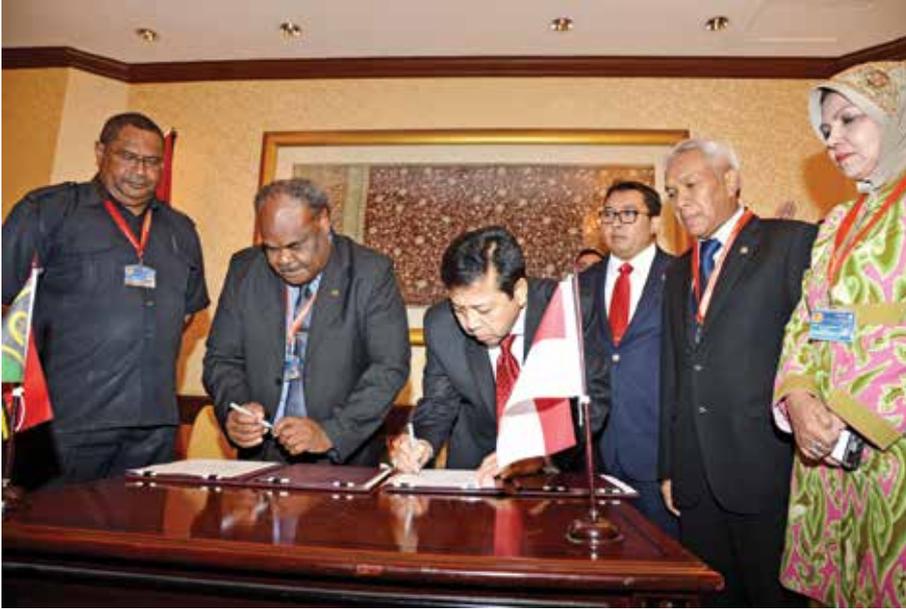
“Isi MoU tersebut antara lain memuat program kerja sama antar parlemen selama periode 2014-2018 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti

dalam bentuk program-program kerjasama yang disepakati kedua belah pihak,” ujar Ketua DPR Setya Novanto saat konferensi Pers di Surabaya, Rabu, (12/11).

Menurut Setya, penandatanganan MoU ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjajaki kerjasama pada sektor strategis yang saling mengun-

tungkan bagi kedua negara.

Sementara Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kerjasama dengan Vanuatu juga harus mengedepankan kepentingan nasional. “Dengan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia-Vanuatu, meskipun bukan negara besar tapi negara Vanuatu



Penandatanganan MoU Parlemen Indonesia dan Vanuatu

menjadi pusat karena dia berada di Pasifik,” terangnya. Pasifik, sehingga dapat menembus pasar

Dia menambahkan, selain itu perlu ditingkatkan *people to people contact* antar kedua negara. “Karena DPR mewakili rakyat, karena itu kita menginginkan mereka dapat mengenal Indonesia lebih jauh,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, lanjut Nurhayati, Vanuatu juga ingin belajar banyak dari Indonesia dalam berbagai sektor. “Mereka menginginkan semacam training dari Indonesia. Hal itu disampaikan oleh mereka. tadi sudah ditandatangani tinggal implementasi. semua bidang termasuk politik dan bidang perdagangan juga,”terangnya.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Ketua Parlemen Vanuatu Philip Boedoro. Disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan Agus Hermanto serta Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf. (si), foto : eka hindra/parle/iw

Pimpinan DPR Harapkan Rekonsiliasi Segera Terwujud



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, islah antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) akan dilanjutkan dengan pertemuan lagi dan akan segera dieksekusi. Terkait masih adanya parpol dari KIH yang menolak kesempatan itu, mungkin parpol di KIH belum klop betul. Karena itu, KMP menyerahkan kepada politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung untuk menyelesaikan dan optimis mampu.

Demikian ditegaskan Agus Hermanto kepada pers Selasa (11/11) mengenai tindak lanjut kesepakatan islah antara KMP dan KIH. Menurutnya, Rapat Paripurna Kamis lusa dijadwalkan akan mengesahkan nama-nama anggota fraksi dalam AKD, khususnya dari kubu KIH.

“Saya berharap Pak Pramono Anung bisa menyelesaikan masalah di kubu KIH, kemudian rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis siang, insya Allah akan bisa terlaksana dan rekonsiliasi bisa terwujud,” ujarnya optimis.

Politisi Partai Demokrat ini mengakui, Senin lalu juru runding dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dan Olly Dondokambey menggelar pertemuan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) diantaranya Idrus Marham (Sekjen Golkar), Ketua DPR Setya Novanto dan Agus Hermanto.

Menurutnya kedua kubu telah sepakat ingin perluas UU MD 3 dalam tahap Pimpinan Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya. Selama ini Pimp-

nan Komisi dan AKD terdiri 1 ketua dan 3 wakil ketua, diperluas menjadi 1 ketua dan 4 wakil ketua sehingga ada 1 wakil ketua yang diberikan kepada KIH.

“Ini bukan semata-mata ingin membeirkan jabatan, melainkan nomenklatur dari kementerian berubah dan perlu diantisipasi sehingga pimpinan tambah dan cabangnya bertambah. Pada akhirnya tugas-tugas legislasi, dan budgeting bisa lebih fokus,” jelas dia.

Setelah ini disepakati, lanjut Agus, juru runding kembali ke markas dan menyampaikan kepada Pimpinan parpol masing-masing. Dari KMP juga perlu menjelaskan kepada pimpinan parpol anggota koalisi, begitu pula dari kubu KIH. Karena itu dia berharap, duta dari KIH Pramono Anung akan menyelesaikan dan memberikan isyarat bahwa mantan Pimpinan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu akan mampu menyelesaikan masalah ini. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Persaki Dukung Penggabungan Kementerian Kehutanan dan LH

Komisi IV mendapatkan masukan mengenai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki). Persaki mendukung penggabungan tersebut, namun mengusulkan nama Kementerannya menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan serta bermitra dengan Komisi IV DPR.

“Bobot dan kegiatan terbesarnya ada di kehutanan, yang lainnya hanya bersifat pengendalian dan membuat kebijakan,” kata Ketua Persaki San Afri Awang, saat menghadiri RDPU dengan Komisi IV yang dipimpin Ketuanya Edhy Prabowo, Senin (10/11), di Gedung Parlemen, Jakarta..

Menurutnya, Kementerian Kehutanan telah diberikan kesempatan lama untuk menghasilkan Sustainable Forest Management (SFM), tapi gak terbukti. Publik melihat kehutanan tidak mampu mewujudkan SFM tersebut. “Jangan hanya *lips service*, kehutanan itu mendukung kehidupan tetapi nyatanya gak berjalan. Ini peringatan juga



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

bagi pegawai-pegawai kementerian kehutanan,” kata San Afri..

Selanjutnya dia menambahkan, jika hutan mendukung lingkungan hidup, seharusnya perbaiki hutannya. Jika dibiarkan maka hanya mengacu pada bisnis sepanjang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak diganti. “Dengan UU No.41 Tahun 1999 diubah dengan perspektif lingkungan yang kuat,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menanggapi penggabungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, dalam pemikirannya sampai sekarang belum ada jawaban yang tepat.

Menurutnya, sampai sekarang belum ada komposisi yang tepat untuk memformulasi penggabungan antara LH dan Kehutanan. “Logika saya sampai saat ini belum ada jawaban yang tepat tentang penggabungan LH dan Kehutanan,” kata Herman..

Harus dipetakan urgensi penggabungan LH dengan Kehutanan yang membuat negara lebih baik. Dia mengkhawatirkan bertambahnya beban kemudian banyak hal yang selama ini menjadi konsen kehutanan justru akan terabaikan.

“Saya justru bertambah curiga dengan diberikan beban kerja yang lebih berat terhadap sektor kehutanan, sehingga tidak konsen untuk mengawasi kehutanan,” tegasnya. (as) foto: naefurodje/parole/iw

Pimpinan DPR Terima Delegasi Parlemen Rusia



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Ketua Parlemen Rusia Valentina I. Matvienko

Pimpinan DPR terdiri Ketua Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan di ruang kerja lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Selasa (11/11) menerima kunjungan Delegasi Parlemen Rusia dipimpin Ketuanya Valentina I. Matvienko.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan penuh persahabatan ini dibahas tentang peningkatan hubungan kedua negara termasuk Parlemen Rusia dan DPR-RI serta meningkatkan hubungan perdagangan, kerja sama industri dan keteknikan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu, ada salah satu *hot issue* yang bisa diambil manfaatnya yaitu tentang UU Minerba yang baru dimana mengatur bahwa Indonesia tidak bisa mengekspor aluminium dengan bahan baku yang masih mentah. Sebaliknya kita hanya bisa mengekspor bahan baku setengah jadi.

Delegasi Parlemen Rusia dalam kesempatan itu juga

membawa teknokrat dan biasa membuat pabrik-pabrik smelter di Indonesia. Setelah dicek kepada Dubes Rusia, kata Agus, mereka ingin sekali bekerja sama untuk mendirikan smelter alumunium yang ada di Indonesia.

Dijelaskan Agus, hal itu sangat menguntungkan karena tujuan kita melarang ekspor bahan baku mentah adalah agar nilai tambah makin besar. “Kalau perlu yang diekspor alumunium yang jadi. Untuk itu Rusia siap membantu membangun pabrik sehingga negara itu pasti akan menerima pasokan alumunium dari Indonesia,” jelas Pimpinan DPR

Koordinator Inbang ini.

Hasil pertemuan ini, lanjut Agus, akan disampaikan kepada Komisi VII dan Komisi VI termasuk mempertemukan industriawan Rusia dengan DPR. Kalau parlemen (P) to Parlemen (P) jalan, maka akan dilepas dan selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dan kalangan pengusaha. DPR akan memfasilitasi supaya di Indonesia banyak smelter alumina yang diharapkan akan mendapatkan bantuan dari Rusia yang pada akhirnya akan menambah pemasukan devisa bagi negara. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Kolom Agama di KTP Bagian dari Identitas Diri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifa mengatakan bahwa kolom agama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) menjadi bagian dari identitas seseorang, sehingga sama pentingnya dengan pencantuman jenis kelamin. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlemen baru-baru ini.

“Kolom agama dalam KTP sama pentingnya dengan kolom jenis kelamin, yakni sebagai identitas diri seseorang, sehingga hal itu wajib ada di dalam KTP yang notabene sebagai kartu identitas diri warga negara. Selain itu, selama ini tidak ada pihak yang meributkan tentang kolom agama, jadi tidak ada alasan bagi Menteri Dalam Negeri untuk menghapus atau menghilangkan kolom agama di KTP,” jelas Ledia.

Tidak hanya itu, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini jika ingin mengubah kolom di dalam KTP artinya juga harus mengubah Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya. Karena KTP yang ada merupakan hasil dari diskusi atau persetujuan dengan DPR yang kemudian dimasukkan dalam peraturan yang ada.



Suasana rapat Komisi VIII DPR

“Ada banyak hal yang lebih penting, lebih mendasar dan lebih substansif yang harus dikerjakan dibanding wacana penghapusan kolom agama di KTP. Sebut saja, pendidikan agama yang harus diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya, pendirian tempat ibadah yang harus diperbanyak, dan lain sebagainya. Semoga saja wacana tersebut bukan untuk mengalihkan isu lain yang sebenarnya lebih penting,” pungkaskannya. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

KPPU Harus Power Full Seperti KPK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini kurang disegani kiprohnya. Banyak kasus yang ditangani KPPU justru kalah di pengadilan. KPPU diharapkan lebih *power full* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Primus Yustisio (F-PAN) anggota Komisi VI DPR menegaskan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU, Senin (10/11). KPPU, kata Primus, merupakan lembaga hukum seperti KPK yang harusnya memiliki *power* dan pengaruh yang kuat di lingkungan para pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

“KPPU harus punya pengaruh seper-

ti KPK. Selama ini kurang *power full* menangani berbagai sengketa kasus persaingan usaha,” ungkap Primus. Padahal, sambungnya lagi, bila KPPU lebih berdaya menjalankan fungsinya, industri dalam negeri bisa terus bergairah, termasuk industri kreatif di Tanah Air.

Sementara selama ini, 80 persen kasus yang ditangani KPPU adalah kasus tender. “Saya berharap KPPU lebih aktif menjalankan tugasnya. Dan Komisi VI DPR harus diberi masukan yang komprehensif soal persaingan usaha ini oleh KPPU,” kata Primus lagi. Para anggota Komisi VI lainnya juga menilai hal yang sama bahwa KPPU selama ini



Anggota Komisi VI DPR Primus Yustisio

tidak memiliki taring. Apalagi, tidak lama lagi Indonesia akan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015.

Peran KPPU sangat strategis dalam

agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Kelak mungkin akan banyak kasus persaingan usaha antara perusahaan lokal dan asing seiring pemberlakuan MEA tersebut. Negara-

negara ASEAN selalu melihat Indonesia sebagai pasar potensial, sehingga perlu dilindungi dari persaingan tidak sehat. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Sistem Presidensial Tak Lazim di Negara Demokratis

Sistem Presidensial dengan multipartai tak lazim diterapkan di negara demokratis seperti Indonesia. Dampaknya, presiden terpilih hanya akan mendapat dukungan politik kurang dari 50 persen. Tentu ini berpotensi menimbulkan konflik politik.

Pangamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris mengemukakan hal tersebut dalam seminar bertema “Arah Koalisi DPR” yang diadakan Pusat Penelitian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR, Senin (10/11). Konflik dengan multipartai memang cenderung membuka ruang konflik antara pemerintah dan DPR, meskipun keduanya saling membutuhkan.

Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Lucius Karus peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan Agus Purnomo politisi PKS. Menurut Syamsuddin, konflik itu mulai terlihat ketika pengesahan UU MD3 dan Tatib DPR di saat puncak persaingan pilpres terjadi. Di sinilah konflik mulai terjadi dengan merumuskan UU yang penuh dengan muatan kepentingan politik.

“UU MD3 ini disahkan *last minute*, bahkan sehari sebelum pilpres, sehingga syarat unsur politis. Makanya ada konflik seperti sekarang ini. Tapi biar bagaimanapun saya tidak setuju jika penyelesaian konflik ini dilakukan dengan menciptakan AKD baru dan atas dasar penambahan jabatan. Itu keliru,” ujarnya.

Sementara itu, Lucius Karus menyoroti soal bentuk koalisi yang dibangun partai-partai. Bentuk koalisi yang ada sekarang, nilainya, hanya merupakan keterwakilan partai. Posisi anggota DPR sebagai wakil rakyat tidak akan sesungguhnya menjadi representasi rakyat, karena fungsi mereka akan dibatasi oleh fungsi koalisi dengan satu suara bulat.



Suasana seminar yang diselenggarakan P3DI

Ini terlihat dari kolasi di dua kubu, baik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) menempatkan dua partai dengan garis ideologi yang berbeda. Koalisi tersebut memperlihatkan koalisi hanya dibangun dengan motivasi pragmatis, bukan ideologis. “Karena pola relasinya adalah pola pragmatis, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa koalisi ini akan bersifat langgeng hingga lima tahun ke depan,” katanya.

Lain lagi dengan politisi PKS Agus Purnomo yang mengatakan bahwa yang paling menentukan dalam arah koalisi ini adalah munas di masing-masing partai. Sukses di internal partai bisa mengubah arah koalisi. “Dalam hal ini munas partai politik menjadi momentum yang menentukan bagi arah koalisi, terutama PPP dan Golkar. Karena dua partai ini yang paling ditunggu di 2 kubu. Kalau PKS, sih, sudah aman lah,” ungkap Agus. (mh,yd)/foto:naefurodji/parle/iw.

Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, kasus Bank Century merupakan salah satu kasus besar yang menjadi sorotan berbagai pihak. “Setelah reformasi, tidak ada lagi peristiwa besar yang melebihi kasus Century. Bahkan Tim Sembilan menjadi selebriti, memenuhi pem-

beritaan,” ungkap Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 pada acara peluncuran buku ‘Tim Sembilan Membongkar Skandal Century’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

Tim 9 sebagaimana ditulis dalam buku karangan Monang Sinaga, man-

tan Ketua Koordinator DPR adalah Bambang Soesatyo (FPG), Andi Rahmat (FPKS), Lily Wahid (FPKB), Ahmad Koerdi Moekri (FPP), M. Misbakhun (FPG) sebelumnya FPKS, Akbar Faisal (Nasdem) sebelumnya Hanura, Ahmad Muzani (Gerindra), Maruarar Sirait (FPDI Perjuangan), Chandra Tirta Wi-



Berpose bersama saat peluncuran buku 'Tim Sembilan Membongkar Skandal Century'

jaya (FPAN).

Selanjutnya Pramono berharap agar kasus Century segera tuntas. Meski

saat ini kepemimpinan sudah berganti, namun aparat penegak hukum tetap menggulirkan kasus ini. Menurutnya, tugas untuk menuntaskan kasus Cen-

tury belum selesai, apalagi suasana dan atmosfer politik sudah berbeda.

Kendati demikian, mantan Pimpinan DPR yang sering memimpin rapat Timwas Century DPR ini merasa yakin aparat penegak hukum terutama KPK tidak ada keraguan untuk menyelesaikan janji yang mereka ucapkan di ruang rapat Gedung Nusantara ini.

Buku setebal 221 halaman ini mengungkap kisah dari awal sampai digulirnya hak angket dan dibentuknya Tim Pengawas kasus Bank Century DPR yang diinisiasi oleh Tim Sembilan. Kata pengarang buku Monang Sinaga, buku ini mengurai kiprah Tim Sembilan-tokoh muda menginisiasi hak DPR pengu-sung isu sangat spektakuler, tidak ada hak angket sebelumnya yang melebihi angket Century. (mp)/foto:andri/parle/iw.

Komisi VIII dan MUI Bahas Implementasi UU JPH

Komisi VIII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas implementasi Undang-undang Jaminan produk halal di ruang Komisi VIII, Senin (10/11). Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Komisi VIII Saleh P Daulay didampingi Wakil Ketua Deding Ishak, Sodik Mujahid dan Ledia Hanifa Amaliah. Sedangkan dari MUI hadir ketua MUI KH. Amidhan didampingi Drs. Baidan Badan Hukum MUI.

Menurut Ketua Komisi VIII Saleh P Daulay, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini perlu mendapatkan pandangan dari masyarakat luas terutama MUI karena di Undang – Undang tersebut MUI disebut secara eksplisit.

“Sehingga nanti rekomendasi dari MUI baik kekurangan ataupun perbaikan bisa dilakukan sekaligus meru-



Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay

muskan peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal,” katanya.

Mengenai prosedur pembuatan jami-nan produk halal yang melalui 10 tahap, Politisi PAN ini mengatakan bahwa

setelah diimplementasikan, Undang-Undang ini baru akan dievaluasi.

“Jika ada kekurangan akan kita perbaiki, namun jika ternyata ini sudah baik tinggal kita atur biar bagaimana di setiap tahapannya tidak terlalu lama prosedurnya,” tambahnya.

Setelah RDPU ini rencananya Komisi VIII akan mengundang Kementerian Agama sebagai mitra kerja Komisi VIII untuk kemudian dalam waktu dekat meminta Kementerian Agama untuk membentuk Badan Pelayanan Jaminan Produk Halal.

“Harapannya adalah setelah badan ini dibentuk, Undang-Undang dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat luas, karena Undang-Undang ini kan dibuat guna kenyamanan umat,” tambahnya. (mp,yd)/foto:andri/parle/iw.

Baleg Siap Bahas Revisi UU MD3

Kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR dapat terpenuhi dengan deal berupa revisi UU MD3. Badan Legislasi DPR (Baleg) siap membahas revisi UU tersebut ketika sudah jelas pasal mana yang akan diubah.

“Memang ada pemikiran dari islah kemarin, salah satunya revisi UU MD3, tapi kan belum ada kesimpulan, pasal-pasal mana yang akan disempurnakan,” kata Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo di Gedung DPR, Senayan,

Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Ia belum bisa memperkirakan berapa lama waktu untuk membahas revisi UU MD3 ini. Yang perlu dilakukan sekarang adalah agar fraksi-fraksi di



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo

KIH segera menyetorkan nama anggotanya di Baleg.

“Nanti kan fraksi-fraksi KIH menyerahkan dulu nama untuk AKD dan disahkan di Paripurna,” ungkapnya.

“Saat ini, masih ada fraksi di KIH yang menolak revisi UU MD3 yaitu NasDem dan Hanura. Firman menerangkan bahwa memang tidak bisa keinginan semua pihak dapat diakomodir dalam suatu negosiasi,” imbuhnya.

Firman menyatakan, namanya ini sebuah negosiasi politik, tentunya dalam teori negosiasi harus ada celah

yang akan diambil, ada kesadaran, tidak mungkin keinginan semua pihak terakomodir.

Sebelumnya, Koordinator KMP Idrus Marham kepada media Senin lalu menegaskan bahwa satu-satunya cara agar KIH-KMP damai adalah hanya melalui perubahan UU MD3.

Menurut pendapat Idrus, karena sudah dilakukan pemilihan (pimpinan komisi dan badan) dan itu legal menurut Undang-Undang, dan itu tidak bisa diubah lagi kecuali hanya mengubah UU MD3. (sc)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Hilman Terpilih Menjadi Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR



Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR RI terpilih Hilman Matauch diapit dua kandidat lainnya

Hilman Matauch, wartawan dari Metro TV terpilih menjadi Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR untuk periode 2014-2016. Hilman berhasil mengungguli pesaingnya, Zul Sikumbang dari Antaranews.com, dengan perolehan 67 suara. Sementara Zul mendapatkan 41 suara.

Hasil ini didapatkan setelah pemilihan berlangsung selama dua putaran.

Bahkan, pemilihan berlangsung selama semalam suntuk, dimulai dari Sabtu (8/11/14) hingga keesokan paginya, Minggu (9/11/14).

Pemilihan berlangsung meriah, namun tidak sampai menimbulkan keributan. Hanya terdapat adu pendapat mengenai tata tertib press room. Setiap wartawan mengajukan pendapatnya mengenai isi tatib.

Sebelumnya, rapat pemilihan sempat dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko. Kemudian diusulkan pemilihan pimpinan sementara dari lima unsur media yang ada di DPR, yaitu wartawan televisi, wartawan koran, wartawan media online, wartawan foto dan wartawan radio.

Seluruh peserta menyetujui Fredi dari Jurnal Nasional untuk menjadi Ketua rapat sementara. Didampingi Haryono PS dari Rakyat Merdeka, Jamida dari Suara Indonesia Baru, Wening (fotografer Jurnal Nasional) dan Nove dari Radio Cakrawala.

Usai dikukuhkan dan penyerahan palu pimpinan, Hilman sempat memberikan sambutan singkat. Ia berjanji akan merangkul seluruh unsur media Wartawan Koordinatoriat DPR. Selain itu, ia meminta kepada wartawan lain untuk memberikan saran dan masukan kepada dirinya selama menjabat Ketua Koordinatoriat DPR sampai dua tahun mendatang. (sf)/foto: andri/parle/iw.

Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

Indonesia dinilai belum siap hadapi persaingan pasar regional lewat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk itu, masyarakat Indonesia dihimbau menghargai

hasil produk dalam negeri sendiri ketimbang produk impor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menegaskan hal tersebut usai

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BSN, Senin (10/11). Hadir dalam rapat tersebut Kepala BSN Bambang Prasetya. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, didam-

pingi tiga wakilnya masing-masing Azam Azman Natawijana (F-PD), Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG), dan Heri Gunawan (F-Gerindra).

Ketika ditanya soal kesiapan Indonesia menghadapi MEA, Heri menjawab, tampaknya Indonesia belum siap sepenuhnya menghadapi persaingan pasar di tingkat regional. “Rasanya belum siap. BSN sendiri masih perlu berbenah diri, terutama soal SDM-nya. Produk mainan anak yang diproduksi di dalam negeri, misalnya, masih jauh dari standar nasional Indonesia (SNI). Kita masih kalah dengan produk Cina,” ungkap Heri.

Pihaknya berharap, BSN lebih giat



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

lagi melakukan promosi kerja, terutama menyangkut perlindungan produk

dalam negeri, agar kualitas mutunya terjamin dan bisa bersaing di pasar global. “Saya berharap BSN dapat melindungi dan membuat standar untuk meningkatkan kualitas produk kita.”

Pada bagian lain, Heri juga mengimbau agar tiga lembaga terkait, yaitu BSN, KPPU, dan Kemendag/Kemenperin bisa berkolaborasi secara sinergis untuk membenahi kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Sinkronisasi tiga lembaga ini dipandang penting untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia mencintai produk sendiri sekaligus meningkatkan mutunya.

(mh)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Buruh Menolak Keras Rencana Kenaikan BBM

Buruh menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM, berapapun tingkat kenaikannya. Hal tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi IX, Dede Yusuf dan Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya, Kamis (6/11) menerima Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang rapat Pimpinan, Senayan, Jakarta.

“Ada beberapa alasan kami menolak rencana kenaikan harga BBM, alasan ekonomis misalnya. Rencana kenaikan BBM sampai sebesar tigaribu rupiah per liter akan membuat daya beli buruh turun hingga lima puluh persen. Ada tiga komponen yang terpengaruh akibat kenaikan harga BBM tersebut, yakni sewa rumah, ongkos transportasi, dan harga bahan pokok. Itu baru tiga komponen, di luar dari itu tentu akan ikut meningkat. Oleh karenanya berapapun kenaikannya, kami menolak,” ungkap Said Iqbal, Presiden KSPI.

Dijelaskan Said, kenaikan upah di Jakarta pada Januari 2014 ini hanya sebesar Rp 200 ribu. Berarti dengan kenaikan BBM sebesar tiga ribu rupiah, ongkos transportasi sebulan bisa 100 ribu, sewa rumah naik 75 ribu sampai 100 ribu, bahan pokok otomatis akan naik hingga 100-150 ribu. Total ketiga komponen itu saja akan menambah



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua Komisi IX Dede Yusuf dan Ketua Komisi VII Kardaya menerima perwakilan dari KSPI

pengeluaran buruh menjadi 350-450 ribu, padahal kenaikan upah hanya 200 ribu. Hal itu membuat kenaikan upah tadi tidak ada makna, bahkan mengalami kemunduran hingga 50 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, akan mengkomunikasikan dengan pemerintah dan menindaklanjuti masukan dari KSPI tadi. Ketua Komisi VII, Kardaya menambahkan bahwa sejauh ini rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah itu dianggapnya masih sebatas rumor, karena secara resmi pemerintah belum mengirimkan surat kepada DPR. Sejatinnya sebelum menaikkan

harga BBM, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan skenario tentang hal tersebut.

“Itu sepenuhnya hak Pemerintah atau Presiden, namun karena itu berkaitan dengan anggaran (APBN) yang digunakannya, DPR harus mengetahuinya. Jika dilihat dari harga BBM dunia, sebenarnya rakyat dunia sedang euphoria akan turunnya harga minyak dunia. Sehingga di berbagai negara mengalami penurunan, bahkan di China sendiri sejak bulan Juni sudah 7 kali mengalami penurunan harga BBM. Tapi kenapa Indonesia sendiri malah naik. Ini kan lucu,” papar Kardaya. (Ayu)/foto: naefurodji/parle/iw.

BSN Harus Blusukan ke Sentra UKM

Badan Standardisasi Nasional (BSN) diminta untuk melakukan blusukan ke sentra-sentra usaha kecil menengah (UKM) di seluruh Indonesia. Banyak UKM yang belum terlindungi produknya oleh BSN.

Anggota Komisi VI DPR Melani Suharli (F-PD) menyatakan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Kepala BSN Bambang Prasetya, Senin (10/11). Menurut mantan Wakil Ketua MPR itu, banyak UKM yang harus mendapat bimbingan dari BSN untuk meningkatkan kualitas produknya.

“UKM perlu mendapat prioritas dari BSN. Sekarang zamannya blusukan, mungkin BSN juga perlu blusukan ke

sentra industri makanan dan minuman yang dikelola UKM. Kadang banyak informasi yang didapat tentang bahaya mengonsumsi makanan dan minuman tertentu. Dan BSN perlu menjelaskan informasi yang meresahkan konsumen tersebut,” kata Melani.

Selain itu, sambung Melani, produk mainan anak yang terbuat dari plastik juga perlu dikontrol secara ketat, karena banyak yang membahayakan. BSN perlu meneliti kandungan bahan baku mainan anak yang beredar di pasar. Yang kini banyak beredar di pasaran adalah produk mainan dari Cina.

Untuk itu, BSN dihimbau agar lebih proaktif menjemput bola kepada para produsen untuk memantau uji mutu



Anggota Komisi VI DPR Melani Suharli

produknya, agar sesuai dengan standar nasional. Ini penting, agar produk dalam negeri punya daya saing dan diakui oleh pasar internasional. (mh)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Pimpinan DPR Berharap Tingkatkan Komunikasi dan Kerja Sama Dengan Pers

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap, tercipta komunikasi dan kerjasama yang intensif, serta pengertian dan pemahaman akan peran masing-masing antar DPR dan pers, sehingga dapat menjalankan perannya dengan optimal.

Demikian diungkapkan oleh Agus, saat memberikan sambutan dalam acara *Press Gathering* Sekretariat Jenderal DPR dan Wartawan Koordinator DPR RI di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Sabtu (8/11/14) malam.

“Mengingat, pentingnya peran media massa, kita mengharapkan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik. Wartawan menjadi ujung tombak dari seluruh informasi yang ada di DPR. DPR secara kelembagaan, sangat terbuka kepada media massa untuk meliput seluruh aktifitas dan kegiatan di lingkungan DPR,” urai Agus.

Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang ini menegaskan, media massa adalah nafas dari informasi. Sehingga, tidak ada yang boleh membelenggu, mengurangi, bahkan menyulitkan awak



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat membuka *Press Gathering*

media untuk meliput.

“Media adalah nafas dari informasi. Rakyat butuh informasi, dan media dapat memberikannya. Tidak mungkin saya berbicara langsung dengan rakyat. Media dapat mengkomodir semua hal itu,” imbuh Politisi Demokrat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Agus menyampaikan bahwa Gedung DPR RI merupakan pusat kegiatan kenegaraan, sehingga perlu adanya penataan penggunaan gedung untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh

aktifitas di Kompleks Parlemen, termasuk aktifitas jurnalis.

“Kami sangat mengharapkan saran dan masukan, sehingga gedung menjadi aman dan nyaman, untuk segala aktifitas, termasuk peliputan. Namun perlu kami sampaikan, pengaturan yang dilakukan bukan untuk membatasi peliputan, tapi bersifat pengaturan agar semua berjalan baik,” tambah Agus.

Agus juga sempat menyatakan, Pimpinan DPR dan Setjen DPR akan terus berusaha meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Ia menilai fasilitas saat ini sudah cukup bagus, namun memang perlu terus ditingkatkan.

“Saya dan Ketua DPR pernah datang ke *Press Room*, tempatnya mesti diperbaiki, supaya nyaman dan maksimal dalam bekerja. Soal fasilitas, saya dan Setjen DPR sudah sering berdiskusi dan pimpinan, untuk kita tingkatkan. Ini sudah bagus, namun perlu ditingkatkan,” janji Agus.

Press Gathering Setjen DPR dan Wartawan Koordinatoriat DPR RI memiliki agenda utama pemilihan Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR

untuk periode 2014-2016. Selain Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, hadir pula Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti dengan didampingi sege-

nap pejabat Eselon I dan II Setjen DPR RI. (sf)/foto:andri/parle/iw.



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti

Setiap sekian waktu, terjadi dinamika yang menarik di Kompleks Parlemen. Namun, tidak seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi mengenai kegiatan DPR. Dengan adanya beragam media massa yang tergabung dalam Wartawan Koordinatoriat DPR RI, informasi itu dapat tersaji dengan cepat ke masyarakat.

“Media massa sangat membantu. Media massa berperan sebagai jembatan informasi bagi DPR kepada masyarakat. Sehingga, tercipta suasana saling melengkapi antara wartawan dengan DPR,” jelas Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, saat ditemui usai pembukaan acara Press Gathering Sekretariat Jenderal DPR RI dan Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua,

Media Massa Berperan Sebagai Jembatan Informasi

Bogor, Sabtu (8/11/14) malam.

Selain itu, tambah Winantuningtyastiti, wartawan juga berperan dalam mengkritisi dan mengingatkan berbagai proses kerja yang sedang berjalan di Alat Kelengkapan Dewan. Sehingga, tercipta hubungan saling menguntungkan dan membutuhkan.

“DPR dan wartawan saling membutuhkan. Anggota DPR membutuhkan media untuk menyosialisasikan segala kegiatannya, sedangkan wartawan membutuhkan berita, apa yang dikerjakan oleh Anggota Dewan dapat menjadi bahan berita,” urai Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti.

Terkait dengan acara ini, dalam pidatonya, Win menyatakan bahwa press gathering bukan hanya sekedar refreshing dari rutinitas di Komplek Parlemen, melainkan ajang silaturahmi, baik sesama wartawan, maupun wartawan dengan DPR dan Setjen DPR.

“Acara press gathering kita adakan setahun 2 kali. Namun, kali ini ada pemilihan pengurus baru Wartawan Koordinatoriat DPR Periode 2014-2016. Saya mencatat, setidaknya ada 140

wartawan yang datang, dari berbagai media,” imbuh Win.

Ia berharap, pemilihan kepengurusan ini dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dinamis dan mengutamakan azas kekeluargaan. Selain itu, pengurus baru dapat melanjutkan kerjasama baik yang telah dirintis dan ditingkatkan di masa mendatang.

“Harapannya, pengurus baru dapat bekerjasama dengan Setjen DPR. Selama ini kerjasama sudah terbina dengan baik. Namun hubungan baik ini bukan berarti meniadakan masukan, karena itu tetap penting. Meskipun perspektifnya beda, namun pemahaman sama, yaitu untuk kemajuan dan memperkuat lembaga DPR,” harap Win.

Sebagaimana diketahui, Setjen DPR dan Wartawan Koordinatoriat menyelenggarakan Press Gathering, dengan acara utama pemilihan Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR untuk periode 2014-2016. Hadir dalam acara ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dengan didampingi segenap pejabat Eselon I dan II Setjen DPR RI. (sf)/foto:naefurodji/parle/iw.

Peringatan Hari Pahlawan di DPR yang Mengesankan

Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang dipimpin oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti kali ini terasa berbeda. Ada tambahan peserta upacara istimewa, Siswa SMA dari 33 provinsi dari seluruh Indonesia. Mereka adalah peserta Babak Final Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 yang dilaksanakan MPR RI.

“Tidak disangka bisa mengikuti upacara Hari Pahlawan di DPR tempat terhormat ini, pastinya tidak semua murid dari Ambon bisa datang ke sini,” kata Joan Manuputi siswa kelas 12, SMAN 12 Ambon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,

Senin (10/11/14).

Joan bersama teman-teman barunya, terlihat khidmat mengikuti upacara yang juga dihadiri oleh Sekjen MPR dan DPR. Ia mengaku tidak dapat menahan haru ketika petugas upacara membacakan Pesan Pahlawan Nasional Soekarno yang juga Presiden RI pertama.

“Berikan aku seribu orang tua niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya dan berikan aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.” Demikian Pesan Pahlawan



Sekjen DPR Winantuningtyastiti saat memimpin upacara Hari Pahlawan

yang dibacakan dengan lantang oleh Novri Roliansyah staf Komite III Biro Persidangan DPD RI.

Sama halnya dengan Joan, Novri juga mengaku merinding ketika membacakan pesan para pahlawan ditengah upacara dan tidak jauh dari tiang Bendera Merah Putih yang baru saja dikibarkan. “Saya merinding ketika membacakan pesan dari Bung Hatta dan Bung Karno,” tuturnya.

Upacara bendera yang berlangsung di halaman Gedung Setjen DPR yang asri memang tidak lama dan tanpa agenda pidato dari Sekjen DPR. Akan tetapi suasana khidmat yang berhasil dibangun telah mendatangkan kesan luar biasa bagi peserta upacara terutama bagi Joan dan teman-temannya. (iky)/foto:naefurodji/parle/iw.

BURT Harapkan Aset-aset DPR Dikelola Secara Maksimal



Tim Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau sarana dan prasarana Griya Sabha Kopo dipimpin Ketua BURT Roem Kono

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengharapkan pengelolaan aset-aset DPR dilakukan secara maksimal. BURT juga ingin mengetahui sejauhmana fasilitas penunjang kegiatan DPR sebagai antisipasi kegiatan-kegiatan Dewan ke depan.

Demikian ditegaskan Roem Kono di sela-sela kunjungan peninjauan sarana dan prasarana ke Griya Sabha Kopo dan ke lokasi pembebasan tanah di Kopo Cisarua, Bogor, Rabu (12/11). Menurutnya, kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui persoalan-persoalan di lapangan termasuk persolan yang di hadapi pengelola Griya Sabha Kopo ini. Tujuan ini nantinya akan dibicarakan dengan Kesetjengan guna mencari jalan keluarnya dan intinya semua kegiatan-kegiatan DPR bisa berjalan dengan baik .

Dari kunjungan ini, kata Roem Kono, merupakan masukan yang baik dan akan dibawa dalam rapat-rapat koor-

maksimal.

BURT sambung Agung, juga ingin mengetahui pemasukan dana dari penyewaan Griya Sabha Kopo cukup atau tidak untuk biaya pengelolaan, dan bila tidak cukup bisa diusulkan dari APBN. Meski demikian, masukan dari sewa penginapan merupakan penghasilan negara bukan pajak yang harus dilaporkan dan dikelola dengan transparan.

Kunjungan peninjauan sarana dan prasarana ke Griya Sabha Kopo Cisarua, Bogor, dipimpin Ketua BURT DPR Roem Kono didampingi 9 (sembilan) anggota BURT yakni, Novita Wijayanti Wakil Ketua BURT (F-Partai Gerindra), Agung Budi Santoso Wakil Ketua BURT (F-PD), A.A Bagus Adhi Mahendra Putra (F-PG), Sri Meliyana dan Susi Marleny Bachsin (F-Partai Gerindra), Muslim dan Anton Sukartono Suratno (F-PD), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), dan Refrizal (F-PKS).(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Sumber Dana Program KIP Harus Jelas

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menegaskan, pemerintah harus dapat menjelaskan dari mana asal sumber dana untuk penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar. Palsanya, sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, belum mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai program ini.

“DPR juga ingin mengetahui soal Kartu Indonesia Pintar ini, apakah hanya berubah judul, atau memang secara substansi ataupun secara program itu lebih baik. Termasuk masalah sumber dananya, dasar hukumnya, dan seterusnya,” jelas Riefky, saat ditemui di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Kamis (6/11).

Politisi Demokrat ini menambahkan, pihaknya ingin memastikan, jika memang kartu ini hanya berubah judul, apakah memberi fasilitas yang baik kepada masyarakat. Selain itu, program Presiden yang cukup baik jangan hanya menjadi pencitraan semata.

“Kita ingin, jika ada perubahan, bukan hanya judul atau kartunya saja. Ini yang akan kita lihat. Sedangkan, soal sumber anggaran, kita belum tahu, karena belum ada penjelasan dari pemerintah dari mana asal sumber dananya,” imbuh Riefky.

Rumor beredar, dana program KIP berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun Riefky tidak bisa membenarkan hal itu. Namun, jika dananya dari CSR, hal ini cukup aneh.

“Menurut kami, kalau (dananya) dari CSR, itu agak aneh. Artinya, kita ini negara hukum, dan semuanya harus disepakati antara Pemerintah dengan DPR, bersama-sama. Nah, kalau kebijakannya masing-masing, biar masyarakat yang menilai,” cetus Riefky.

Politisi asal Dapil Aceh ini menuturkan, seluruh program yang baik dari pemerintah, pasti pihaknya akan mendukung. Namun, jika dana tidak dijelaskan secara gamblang, ia khawatir ini akan berbuntut panjang.



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

“Apa yang baik untuk Pemerintah, pasti kita dukung. Tapi mari bersama-sama kita bicarakan terlebih dahulu, baru kita terapkan. Jangan hanya mengejar pencitraan di awal, tapi kedodoran di pertanggungjawabannya. Kasihan juga pemerintah kalau seperti itu. Harus ada yang menanggung setelah ada audit BPK,” tegas Riefky.

Untuk itu, DPR akan membahas tentang program ini dengan Pemerintah dalam rapat kerja. Riefky menegaskan, soal KIP ini akan menjadi isu utama pembahasan. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Masalah Karyawan MNA

Nasib para karyawan Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang lama terkatung-katung dalam ketidakjelasan status, akan segera dibantu penyelesaiannya oleh Komisi VI DPR. Pemerintah diminta segera selesaikan masalah karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) sesuai rekomendasi Komisi VI DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan (F-Gerindra), menegaskan, Komisi VI berkewajiban menyampaikan keluhan para karyawan MNA ini ke pemerintah. Selama Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, rekomendasi DPR yang disampaikan 2 Juli 2014 itu, tidak ditindaklanjuti. Kini, di bawah Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno, rekomendasi tersebut segera dikonfirmasi



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

lagi untuk mengetahui sejauh mana hambatan dan responnya.

“Yang pasti rekomendasi Panja sudah ada. Kami berharap secara formal karyawan Merpati Nusantara membuat surat kepada kami, supaya nanti kami tembuskan kepada pemerintah atau instansi terkait. Kami berharap permasalahan ini dapat terselesaikan,” ujar Heri, Kamis sore (6/11). Seperti diketahui, DPR periode lalu sudah mengeluarkan rekomendasi yang salah satu isinya menyebutkan, agar BPK melakukan audit investigasi terhadap PT.MNA.

Semua aset MNA juga harus direvitalisasi untuk kemudian dimanfaatkan demi menyehatkan kembali MNA. Para karyawan MNA yang menemui Pimpinan Komisi VI DPR, merasa gamang dan resah selama bertahun-tahun. Sta-



sus mereka pun tak jelas, apakah masih menjadi Karyawan PT. MNA atau sudah di-PHK. Gaji atau pun pesangon tak pernah diterima. Semuanya dalam kondisi ketidakpastian. Padahal, rekomendasi DPR sudah dilayangkan 21 Juli lalu.

“Masih ada kegamangan dari teman-teman Karyawan PT.MNA yang belum ter-follow up, karena kurangnya perhatian Kementerian BUMN ter-

hadap BUMN-nya sendiri. Walau pun kondisinya sedang memburuk, MNA ini adalah aset negara yang harus dilindungi dan diamankan. Merpati, kan, melintasi jalur perintis yang jalurnya menurut saya merupakan jalur gemuk dibanding maskapai lainnya,” ungkap Heri. Seraya menambahkan, “Semoga ada kerja sama yang baik dengan kementerian terkait, agar masalah ini dapat terselesaikan.”

Di hadapan Pimpinan Komisi VI, para karyawan kembali menagih janji pemerintah yang akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi VI tersebut. Mereka kembali menuntut agar hak-hak normatif karyawan seperti gaji, uang makan, transpor, lembur, dan THR selama 12 bulan segera dibayarkan. Begitu juga hak-hak normatif pensiunan seperti pesangon, uang penghargaan, dan pengganti hak. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi I Rapat Perdana Dengan Mastel



Komisi I DPR saat RDPU dengan Masyarakat Telematika Indonesia

Parlemen hari ini telah mencatat dengan tinta emas bahwa mitra kerja Komisi I DPR adalah Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Dikatakan bersejarah, karena tanggalnya 10 Nopember bertepatan dengan hari Pahlawan. Hari Senin ini disebut bersejarah karena hari ini adalah rapat yang pertama kali, dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama DPR dengan Mastel.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, saat memimpin RDPU dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Setyanto P Santoso di ruang rapat Komisi I DPR gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta, Senin (10/11).

Tantowi mengatakan, RDPU ini dalam rangka menciptakan iklim kerja Komisi I DPR yang sudah mulai kondusif di Parlemen. Dalam acara ini hadir pimpinan lengkap Komisi I DPR yakni Ketua Komisi I DPR Machfudz Sidiq, para Wakil Ketua Hasril Tandjung, Hanafi Rais dan Tantowi Yahya selaku ketua rapat.

Menurut dia Komisi I DPR mempunyai 4 bidang besar yaitu Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Kominfo. Dalam rangka untuk mempertajam pengawasan dan kemitraan dengan para mitra maka Komisi I DPR membentuk 4 Pokja Komisi.

Pokja pertahanan yang dipimpin Hasril Tandjung, Pokja Luar Negeri termasuk didalamnya Kemenlu dan 132 perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri dipimpin Hanafi Rais, Pokja Kominfo dan Intelijen digabung menjadi satu dipimpin Tantowi Yahya sementara Ketua Komisi tetap menjadi Koordinator.

Pada kesempatan ini Ketua Umum Mastel Setyanto P Santoso mengatakan, perlu disadari pada abad ke-21, telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks kenegaraan, masyarakat bahkan individu. Infrastruktur telekomunikasi dewasa ini, khususnya Jaringan Pital-ebar atau lebih sering dikenal sebagai *Broadband Networks* telah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat

kat di abad 21.

Dia mengemukakan, *Broadband* merupakan infrastruktur ekonomi yang sangat vital yang akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Infrastruktur telekomunikasi tidak dapat lagi dipersepsikan sebagai suatu sarana dan prasarana yang dipergunakan hanya untuk menghubungkan komunikasi dari suatu titik ke titik yang lainnya. Tetapi juga sebagai faktor pengungkit, faktor penentu yang akan menjamin keberhasilan pada sektor manapun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Setyanto P Santoso mengatakan, telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu pembangunan ekonomi. Dalam kaitan inilah Bank Dunia mengemukakan hasil penelitian mereka bahwa setiap pertumbuhan 10 persen penetrasi akses internet di suatu negara, akan mendorong tumbuhnya Produk Domestik Bruto di negara tersebut sebesar 1,38 persen.

“Tidak mengherankan apabila di negara maju seperti Amerika Serikat, mereka mengelompokkan infrastruktur telekomunikasi sebagai *critical-infrastructure* atau infrastruktur kritis, dimana gangguan terhadap infrastruktur telekomunikasi baik secara fisik maupun virtual dikategorikan sebagai suatu pelanggaran berat dengan ancaman pidana,” tegas Setyanto. (Spy)/foto:andri/parle/iw.



Komisi IV DPR RI RDPU dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo didampingi Wakil Ketua Herman Khaeron, Rabu (12/11) Foto: Naefurodjie/Parle/Iw.



Komisi VIII DPR RI RDPU dengan Ormas-ormas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin Ketua Komisi VIII Saleh P Daulay terkait pelaksanaan UU Pengelolaan Keuangan Haji, Senin (10/11) Foto: Andri/Parle/Iw.



Komisi X DPR RI RDPU dengan Prof. Anwar Arifin dan Prof. Margarito Kamis dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya bahas Nomenklatur Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kamis (6/11) Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.